

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1. Kesimpulan**

Melihat dari kondisi ideal dan gambaran kondisi yang ada di lapangan. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

##### **a. Faktor Kesenjangan Gender**

Faktor kesenjangan gender berdasarkan analisis yang dilakukan adalah kepentingan kelompok sasaran dan manfaat yang diterima. Kepentingan kelompok sasaran sudah dipahami oleh pihak internal. Dapat dikatakan bahwa apa yang telah ditulis telah dipahami. Hanya menurut penggambaran yang ada pemahaman dalam aturan khususnya kepentingan kelompok sasaran tidak dipahami sebagaimana yang harusnya dapat dilakukan dengan pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan kepentingan kelompok sasaran tergambar tidak secara nyata namun terselubung secara makna dalam kebijakan.

Manfaat yang diterima sudah tertulis di kebijakan secara baik namun maknanya masih secara terselubung. Maka dari itu dari gambaran lapangan masih belum dapat terlaksana sesuai karena pemahaman akan manfaat ini tidak diterima secara mendetail dan spesifik untuk siapa dan kenapa. Perubahan yang diinginkan yang belum tertulis adalah sebuah hal yang tidak baik. Karena dengan tidak diketahuinya perubahan yang seharusnya maka implementasi tidak memiliki arah dan tujuan.

**b. Penyebab kesenjangan gender dari internal berdasarkan pada penyusunan rencana kerja**

Pelaksana yang terlibat masih cukup sedikit dengan pemahaman yang masih berbeda-beda. Sumber daya pelaksana dari kebijakan ini juga hanya ada 1 orang di dinas yang memiliki dampak kurangnya kinerja karena pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya. Karakteristik kepemimpinan adalah hal tersebut penting karena dalam sebuah organisasi yang dipimpin jikat ketua dan anggota yang seharusnya lebih memahami pimpinan tidak memiliki pemahaman yang sama atau bahkan seharusnya lebih. Kekuasaan dan strategi yang terlibat dalam implementasi kebijakan sudah cukup baik dimana tidak adanya diskriminasi atau dikotomi terhadap suatu gender.

Namun karakteristik kepemimpinan yang tidak menjadikan pengarusutamaan gender adalah sebuah masalah. Karena jika tidak adanya arahan dari atasan maka anggota tidak akan melaksanakan kebijakan atau pekerjaan dalam dinas. Maka dari itu hal ini juga mempengaruhi tingkat kepatuhan dan responsivitas yang dirasa baik namun belum secara mendalam dan menjiwai dalam pelaksanaannya serta karena tidak difokuskan juga maka tidak dapat terlaksana dengan optimal.

## 6.2. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti mengenai analisa ini terhadap rencana kerja dinas pendidikan, adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan untuk isi kebijakan khususnya mengenai penjelasan agar tidak salah dalam pemahaman.
2. Penambahan jumlah sumber daya yang disertai tugas yang jelas dan terperinci.
3. Pemahaman yang dapat diberikan secara keseluruhan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman khususnya antara pemimpin dan anggota.
4. Tingkat kepatuhan yang sudah cukup baik namun tidak mendalam serta terarah, hanya patuh namun tidak dapat melaksanakan dengan bagian dan sektornya secara tepat dan memiliki target.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- Creswell, J. W. 2009. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Newbury Park : Sage Publications.
- Bruce L. Berg and Howard Lune. 2012. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*. 8th ed. USA: Pearson.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Heryani, Ani. 2010. *Paradigma Kebijakan Publik*. Bandung : UNPAD PRESS.
- KEMENPPA. 2010. *Pedoman Teknis Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*
- Lester, James P dan Steward, Joseph Jr. 2000. *Public Policy:An Evolutionari Approach*. Belmont : Wadsworth.
- Merilee S. Grindle. 2017. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Moleong J. Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, Ulber. 1999. *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung : Bina Budhaya.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rafika Aditama.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Peneltian Sosial*, Bandung : PT Refika Aditama.

**Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pertauran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur Jawa Barat No 1 Tahun 2013 Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.